

Publik Tak Setuju TV Analog Distop, Harga STB yang Mahal Jadi Kendala

JAKARTA (IM) - Mahalnya harga set top box (STB), perangkat untuk mendapatkan akses siaran televisi berbasis digital, menjadi keluhan terbanyak publik Indonesia. Demikian temuan dalam survei yang dilakukan Poltracking Indonesia pada bulan November 2022.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam pemaparannya, peralihan siaran televisi analog ke digital menjadi salah satu isu aktual yang belakangan mengemuka di tengah masyarakat.

Lembaganya ingin memotret keluhan apa saja yang dirasakan publik atas kebijakan tersebut.

“Publik mengatakan, peralatan tv digital atau set top box mahal merupakan kendala utama dalam peralihan siaran tv analog ke tv digital,” kata Hanta Yuda dalam paparan hasil surveinya secara daring, Kamis (8/12).

Dalam data yang dipaparkan, keluhan publik atas mahalnya harga STB menduduki urutan teratas dengan angka sebesar 31,4%. Selanjutnya, keluhan atas kualitas signal digital tidak merata sebesar 16,4%. Sementara, di peringkat ketiga diisi oleh publik dengan keluhan akses channel terbatas dengan angka sebesar 10,1%.

“Publik mengatakan, tidak tahu atau tidak jawab sebesar 42,1%,” ujarnya.

Untuk diketahui, survei Poltracking Indonesia ini dilakukan pada tanggal 21-27 November 2022 dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden.

Adapun, jumlah sampel yang diambil dalam survei ini sebanyak 1.220 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Sementara, margin of error yang ditetapkan dalam survei ini $\pm 2,9\%$, dengan tingkat kepercayaan 95%. ● han

KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Matheus Joko Santoso

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan milik terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19, Matheus Joko Santoso di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, Tangerang, Banten, Jumat (9/12).

Barang rampasan yang akan dilelang yakni satu unit mobil Toyota tipe Corolla Cross warna merah metalik dengan nomor polisi B 207 DSW.

“KPK bersama dan melalui KPKNL Tangerang I akan melaksanakan lelang barang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding),” kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam siaran pers, Kamis (8/12).

Lelang ini dilakukan beserta dengan satu kunci mobil, BPKB asli, STNK asli yang dikuasai oleh KPK.

Ali mengatakan, barang rampasan tersebut dilengkapi sejumlah dokumen yang mencakup, tiga lembar kuitansi asli PT Astra International Tbk dan Toyota Sales Operation untuk pembayaran mobil Corolla Cross. Lalu ada satu buah surat tanda nomor asli kendaraan dengan nomor 20227219.C.

Adapun nomor registrasi B 207 DSW atas nama Daning Saraswati. Berikutnya, satu buah buku pemilik kendaraan nomor Q-02753380 atas nama Daning Saraswati dengan nomor registrasi B 207 DSW merk Toyota tipe Corolla Cross.

Ali mengatakan pelelangan barang rampasan tersebut dijual dengan harga limit Rp 375,7 juta dan uang jaminan Rp 150 juta.

“Lelang ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Matheus Joko Santoso,” imbuhnya.

Sebelumnya, Joko dipidana 8 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara korupsi dana bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020. Selain itu, Joko dijatuhi pidana pengganti Rp 1,5 miliar.

Dalam perkara ini, Joko terbukti melakukan tindak korupsi bersama-sama dengan Adi Wahyono dan mantan Menteri Sosial Julianti Batubara sebesar Rp 32,48 miliar. Uang itu merupakan hasil dari permintaan Rp 10.000 tiap paket pengadaan bansos covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. ● mei

Pemerasan Modus VCS, Pelaku Raup Rp500 Juta dari Para Korban

SERANG (IM) - Pria inisial B (22) asal Riau ditangkap karena memeras seorang warga Tangerang, Tangerang, Banten, dengan modus video call sex (VCS). Polisi menyebut B meraup uang hingga Rp 500 juta dari pemerasan yang dilakukan terhadap 50 korban.

Polisi menangkap B berdasarkan laporan yang dibuat seorang pria berinisial Y. B mengenal Y dari aplikasi MiChat.

“Total korban Y diperas hingga Rp 16 juta,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Raden Romdhon Natakusuma di Polresta Tangerang, Kamis (8/12).

Romdhon menyebut B mengaku sebagai wanita kepada Y. Tujuannya agar Y tertarik melakukan VCS dengannya.

“Saat video call, tersangka yang aslinya pria, melakukan manipulasi seolah-olah dirinya wanita. Itu dilakukan untuk membuat korban tertarik,” jelas Romdhon.

Saat melakukan VCS dengan korban, tersangka rupanya melakukan perkeaman. Setelah itu, B melakukan pemerasan dengan mengancam korban jika permintaannya tidak dikabulkan maka videonya akan disebarkan.

askan. Korban Y, yang merupakan warga Tangerang, diminta beberapa kali mengirimkan uang kepada tersangka.

“Korban diminta mengirim uang Rp 3 juta untuk membeli tas,” ujarnya.

Pada Minggu (18/10), bahkan korban diminta mengirimkan uang sebanyak dua kali.

Pada Senin (19/10), korban diancam akan menyebarkan video VCS-nya dan disebarkan ke istri dan temannya.

“Korban yang tertekan tak ingin malu meminta Tersangka tidak menyebarkan video. Tersangka memeras korban dan minta uang untuk liburan ke Bali,” ujarnya.

“Pemerasan tersangka B dilakukan hingga Rp 16,2 juta. Korban lalu lapor ke Polresta Tangerang,” terang Romdhon.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Kriminal Khusus Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Ipda Prasetya Bima Praelja menambahkan, tersangka rupanya memang spesialis penipuan melalui media sosial. Pelaku mengaku sudah menjerat 50 korban dan meraup uang Rp 500 juta.

“Korban tipu daya korban mencapai 50 orang di berbagai daerah dengan hasil Ro 500 juta. Tersangka mengaku melakukan pemerasan dengan modus menyebar video rekaman VCS,” katanya.

Perbuatan tersangka mengancam korban dan meraup ratusan juta diancam Pasal 45 ayat 1 dan 4 juncto Pasal 27 ayat 1 dan 4 Undang-Undang ITE. Pelaku diancam pidana penjara selama 6 tahun. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PERSIAPAN PENGAMANAN LOKASI PERNIKAHAN PUTRA PRESIDEN

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) meninjau persiapan pengamanan untuk acara resepsi ngunduh mantu pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono, di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/12). Resepsi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akan diselenggarakan di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Minggu (11/12).

Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Bersihkan Puing Rumah Warga Korban Gempa Cianjur

Presiden Jokowi meminta TNI dan Polri untuk membantu membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi warga terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, Kamis (8/12).

Dengan menggunakan rangkaian kendaraan darat, Presiden Jokowi berangkat dari Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 07.30 WIB menuju Kabupaten Cianjur,

Provinsi Jawa Barat. Kepala Negara terlebih dahulu meninjau posko bencana gempa bumi Badan Intelijen Negara (BIN) di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Saat tiba di lokasi, Presiden Jokowi disambut anak-anak dengan nyanyian berjudul manuk dadali. Puluhan anak-anak pengungsi tersebut telah

mengikuti kegiatan trauma healing di Posko BIN. Disana Presiden pun membagikan makanan dan juga bantuan kepada para pengungsi. “Makanannya habis enggak ini?” tanya Presiden. “Habis Pak,” jawab anak-anak serempak.

Selanjutnya, Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Tembak Yonif Raider 300, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.

Presiden direncanakan untuk menyerahkan bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban bencana gempa bumi Cianjur beberapa

waktu lalu. Kemudian, Presiden akan meninjau salah satu lembaga pendidikan yang rusak terdampak gempa bumi yakni SDN 1 Sukamaju di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang. Jokowi dijadwalkan akan kembali ke Jakarta setelah peninjauan tersebut selesai.

Beri Arahan ke TNI-Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri untuk membantu membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur.

Arahan tersebut disampaikan langsung Presiden Jokowi kepada Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Sunana, di Posko Gempa Cianjur Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (8/12).

“Saya minta saja TNI, Polri mulai digerakkan untuk membersihkan (kawasan ini, Cugenang). Di lapangan harus mulai menggerakkan masyarakat untuk membantu membersihkan. Jadi nanti seminggu lagi ke sini diharapkan sudah mulai bersih dan sudah mulai ada kegiatan membangun rumah,” ujar Presiden di Cianjur, Kamis (8/12).

“Siap, laksanakan, Bapak

Presiden,” ujar Pangdam dan Kapolda.

Sebelumnya, saat memberikan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa Cianjur di Yonif Raider 300, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Presiden Jokowi juga mendorong masyarakat agar segera memulai proses rekonstruksi rumahnya yang rusak.

Menurut Jokowi, warga bisa memulainya dengan membersihkan puing-puing rumahnya dan bisa dibantu TNI-Polri jika dibutuhkan.

“Kita bersama-sama segera membersihkan rumah kita masing-masing, memulai, dan nanti akan dibantu oleh TNI dan Polri, dibantu pemberisihannya, dibantu pembangunannya. Kalau memang diperlukan TNI dan Polri siap,” katanya.

Sebelum memasuki mobil, Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada warga bahwa pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah warga terdampak gempa.

“Untuk yang rusak berat, pemerintah akan memberikan bantuan Rp60 juta. Untuk yang rusak sedang Rp30 juta, Rp15 juta untuk rumah rusak ringan,” kata Presiden.

“Terima kasih, Pak,” jawab seorang warga dengan menggunakan pengeras suara. ● han

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan hakim Mahkamah Agung (MA), Gazalba Saleh (GS), Kamis (8/12). Gazalba Saleh merupakan salah satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA.

Gazalba dijebloskan ke penjara usai diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. KPK menahan Gazalba Saleh untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka GS dilakukan penahanan selama 20 hari pertama dimulai tanggal 8 Desember 2022 sampai 27 Desember 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” kata Wakil Ketua KPK, Johannis Tanak saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/12).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hakim Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA. Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka bersama dua anak buahnya di MA.

Adapun, kedua anak buah Gazalba yang ikut jadi tersangka yakni, Hakim Yustisial

sekaligus Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA, Prasetyo Nugroho (PN) dan Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza (RN). Mereka diduga terlibat pengurusan kasasi atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Di mana, Gazalba Saleh merupakan salah satu hakim anggota yang memutus perkara dengan terdakwa Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparno.

Dalam perkara ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. Hakim Gazalba Saleh dan anak buahnya diduga juga turut menerima aliran uang suap tersebut.

KPK sedang mendalami lebih detail rincian yang suap yang diterima para pegawai dan Hakim MA. ● han



SIDANG HENDRA KURNIAWAN DAN AGUS NURPATRIA

Terdakwa kasus merintang penyidikan atau “obstruction of justice” pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Hendra kurniawan (kiri) dan Agus Nurpatria (kanan) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (8/12). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi mantan Asisten pribadi Ferdy Sambo, Novianto Rifa’i.

Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Rabu (7/12/) siang. Adapun SPDP adalah mekanisme penuntut umum melakukan pengawasan dan menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum.

“Sampai sejauh ini ya saya baru menerima informasi dari media. Nanti saya cek dulu apakah ini sudah ada SPDP apa tidak. Biasanya dalam waktu 3 hari penyidik itu wajib menyerahkan SPDP kepada penuntut umum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (8/12).

Sementara terkait kasus tambang ilegal Kaltim itu, polisi telah menetapkan 3 orang tersangka. Salah satunya, mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong.

Ketut mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu SPDP dari penyidik Bareskrim Polri.

“Iya karena baru kemarin mungkin kita baru menunggu

Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

ini ya. Saya juga cek, kalau seandainya sudah dikirim pasti kita terima dan kita sampaikan ke media,” katanya.

Ketut menegaskan bahwa Kejagung tidak ikut melakukan penyelidikan dalam kapasitas sebagai penyidik. Sebab, perkara tersebut ditangani langsung oleh penyidik di Bareskrim Polri.

“Kejagung tidak menyelidiki, tidak kapasitas sebagai penyidik tetapi di sini dalam kapasitas prapenuntutan perkara aja,” kata Ketut.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batu bara ilegal di Kaltim pada Rabu (7/12/), Ismail Bolong langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

Ismail diketahui berperan mengatur rangkaian penambang ilegal serta komisaris dari perusahaan PT EMP yang melakukan tambang ilegal. Dua tersangka lainnya yakni BP yang berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal.

Kemudian, RP selaku kuasa Direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP.

Dalam kasus ini, Ismail dan dua tersangka lainnya dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta Pasal 55 ayat 1 KUHP. ● han

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Daya Maju Lestari, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), mengumumkan bahwa proses pengambilalihan saham-saham dalam Perseroan telah selesai dilaksanakan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 09/12/2022
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler) PT. WIRA SEMESTA, berkedudukan di Jakarta Selatan tertanggal 30 November 2022, diberitahukan bahwa sebagian besar saham milik perseroan telah dialihkan/berpindah kepemilikan kepada pemegang saham baru.

Demikian diberitahukan kepada seluruh pihak yang berkaitan harap menghubungi Direksi Perseroan dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ini.

Jakarta, 09 Desember 2022
Tertanda
Direksi